



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN KAWASAN WANA WISATA PANTAI JOLOSUTRO
ANTARA
PERUM PERHUTANI KPH BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH DESA RINGINREJO KEC. WATES KAB. BLITAR**



Nomor : 22 / PPB / BTR / DIVRE-JATIM / 2020
Nomor : 415.4 / 24 / 409.103 / 2020
Nomor : 556 / 369 / 409.38.5 / 2020

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (8 - 6 - 2020), bertempat di Blitar kami yang bertandatangan dibawah ini:-----

1. Nama : Ir. ARIES INDRA SUPARTHA, M.Si-----
Jabatan : Administratur Perum Perhutani / KPPH Blitar-----
Alamat : Jl. Sudanco Supriyadi No. 24 Blitar-----

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 293/Kpts/Dir/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 dan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 937/Kpts/Dir/2016 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;---

2. Nama : SUHENDRO WINARSO, SSTP.M.Si-----
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar-----
Alamat : Jl. A Yani Nomor 11 Blitar-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Pendelegasian Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Bupati Blitar Nomor: 556 / 22 / 409.103 / 2019 berkedudukan di Jalan A Yani Nomor 11 Blitar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;-----

3. Nama : BINTORO-----
Jabatan : Kepala Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar-----
Alamat : Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019. Dari dan oleh karena itu bertindak



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN KAWASAN WANA WISATA PANTAI JOLOSUTRO
ANTARA
PERUM PERHUTANI KPH BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH DESA RINGINREJO KEC. WATES KAB. BLITAR**



Nomor : 22 / PPB / BTR / DIVRE-JATIM / 2020
Nomor : 415.4 / 24 / 409.103 / 2020
Nomor : 556 / 369 / 409.38.5 / 2020

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (8 - 6 - 2020), bertempat di Blitar kami yang bertandatangan dibawah ini:-----

1. Nama : Ir. ARIES INDRA SUPARTHA, M.Si-----
Jabatan : Administratur Perum Perhutani / KPPH Blitar-----
Alamat : Jl. Sudanco Supriyadi No. 24 Blitar-----

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 293/Kpts/Dir/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 dan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 937/Kpts/Dir/2016 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;-----

2. Nama : SUHENDRO WINARSO, SSTP.M.Si-----
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar-----
Alamat : Jl. A Yani Nomor 11 Blitar-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Pendelegasian Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Bupati Blitar Nomor: 556 / 22 / 409.103 / 2019 berkedudukan di Jalan A Yani Nomor 11 Blitar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;-----

3. Nama : BINTORO-----
Jabatan : Kepala Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar-----
Alamat : Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019. Dari dan oleh karena itu bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**; -----

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk melakukan pengelolaan Kehutanan Negara yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 yang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayah kewenangannya; -----
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Ringinrejo yang bertugas melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Ringinrejo Kecamatan Wonotirto; -----
4. Bahwa **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** telah membuat Nota Kesepakatan Bersama (MOU) Nomor: 134/ I.21/409.05/2020 dan Nomor: 20a / PBB /Btr / Divre Jatim /2020 tanggal 5 Juni 2020 Tentang Pemanfaatan, Konservasi, dan Pelestarian Hutan ; -----
5. Bahwa **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan wana wisata Serang di Blitar dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut, akan menjalin kerja sama dengan **PIHAK KETIGA** sebagai pengelola; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Pantai Jolosutro di RPH Ringinrejo, BKPH Kesamben, KPH Blitar, masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

Dasar Perjanjian ini adalah :-----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; -----
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; -----
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; -----
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; -----
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; -----
8. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -----
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; -----
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; -----
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan; -----
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; -----
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; -----
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara; ---
16. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata ; -----
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT- II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan ; -----
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT – II/2006/2012 tentang Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung ; -----
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ; -----
20. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan; -----
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah ; -----
22. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ; -----
23. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 937/Kpts/Dir/2016 tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani. -----

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud perjanjian ini adalah menggali potensi sumber daya hutan di bidang pemanfaatan berupa usaha wisata alam dan mengembangkan potensi wisata daerah: -----
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk lebih meningkatkan pengembangan kepariwisataan daerah, daya guna dan hasil guna serta produktivitas kawasan hutan khususnya pemanfaatan jasa lingkungan hutan bagi **PARA PIHAK**; -----

Pasal 3

LOKASI DAN OBYEK KERJASAMA

1. Lokasi perjanjian dalam pengelolaan Wana Wisata Pantai Jolosutro ini adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh PIHAK KESATU di petak 75B, Kelas Hutan Lindung, Resort Pangkuan Hutan (RPH) Ringinrejo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kesamben Bagian utan Blitar, KPH Blitar, masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar seluas 6 ha (hektar) dari luas baku 130,4 ha (Hektar); -----

2. Obyek perjanjian pengelolaan Wana Wisata Pantai Jolosutro berupa: -----
- a. Penyusunan masterplan pengembangan wisata Pantai Jolosutro ; -----
 - b. Pembangunan prasarana dan sarana wisata; -----
 - c. Usaha Jasa Wisata;-----
 - d. Rehabilitasi hutan dan lahan; -----
 - e. Promosi dan Pemasaran;-----
 - f. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;-----
3. Lokasi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta situasi sebagai lampiran yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini. -----

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Menerima bagi hasil sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan setelah dikurangi kewajiban membayar pajak dan asuransi yang dibayarkan setiap bulan setelah penandatanganan perjanjian ini ; -----
- b. Menerima laporan pendapatan kotor per bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya serta menerima laporan bukti penjualan karcis dari **PIHAK KETIGA** dan menyimpan bukti penjualan karcis (dalam bentuk bonggol) ; -----
- c. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan kawasan wana wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 perjanjian ini; -----
- d. Dapat menugaskan personil untuk ikut serta bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** memonitor penjualan karcis masuk ;-----
- e. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengamankan dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan;-----
- f. Melakukan penutupan terhadap obyek wisata dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** apabila berpotensi terjadi bencana alam dan atau sebab lainnya; -----
- g. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menetapkan harga karcis tanda masuk (KTM);-----
- h. Menerima salinan daftar nomor seri Karcis Tanda Masuk yang diperporasi dari **PIHAK KEDUA**; -----

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:-----

- a. Menyediakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pengembangan Wisata Pantai dan pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;-----
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** meningkatkan dan melindungi sumberdaya hutan yang terletak dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini dan disekitarnya secara berkelanjutan; -----

- c. Memelihara alur, batas hutan/batas areal obyek yang dikerjasamakan dan ikut membantu menjaga fasilitas obyek wana wisata yang dikelola **PIHAK KETIGA**;-----
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi pada **PIHAK KETIGA**;-----
- e. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengadakan penataan, pengembangan dan pemeliharaan Fasilitas Obyek Wisata;-----
- f. Mengawasi, memelihara dan mengizinkan pemasangan rambu-rambu wisata dan sarana sarana wisata;-----
- g. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ; -----
- h. Mengkoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pihak terkait lainnya apabila terjadi bencana alam pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan ; -----

3. **PIHAK KEDUA** berhak;-----

- a. Menerima bagi hasil sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan setelah dikurangi dari kewajiban membayar pajak, dan asuransi yang dibayarkan setiap bulan setelah penandatanganan perjanjian ini; -----
- b. Memanfaatkan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk keperluan pengembangan wisata dan pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prioritas anggaran serta kemampuan daerah;-----
- c. Menerima laporan pendapatan kotor per bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari **PIHAK KETIGA** dan bukti setoran bonggol karcis ke **PIHAK KESATU**;-----
- d. Dapat menugaskan personil untuk ikut serta bersama-sama melakukan monitoring penjualan karcis masuk; -----
- e. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini; -----
- f. Bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menetapkan harga karcis masuk (KTM);--

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban;-----

- a. Mengadakan penataan, pembenahan dan pengembangan fasilitas obyek wisata dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah daerah serta memperhatikan kaidah konservasi dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** ikut dalam usaha melindungi dan mengamankan sumber daya hutan pada lokasi perjanjian dan sekitarnya secara berkelanjutan; -----
- c. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menjaga, memelihara dan meningkatkan fasilitas wisata pada lokasi perjanjian;-----
- d. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan wisata kepada **PIHAK KETIGA**; -----
- e. Mengkoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pihak terkait lainnya apabila terjadi bencana alam pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan ; -----

- f. Menerbitkan rekomendasi terkait permohonan Usaha Jasa Wisata yang didasarkan pada hasil koordinasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**; -----
- g. Mencetak dan membayar pengadaan Karcis Tanda Masuk dan membuat permohonan daftar nomor seri Karcis Tanda Masuk untuk diperporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;-----
- h. Memberikan salinan daftar nomor seri Karcis Tanda Masuk yang diperporasi kepada **PIHAK KESATU**; -----
- i. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** memasang rambu-rambu tanda peringatan bahaya untuk para pengunjung;-----

5. **PIHAK KETIGA** berhak: -----

- a. Menerima bagi hasil sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan dari perjanjian kerjasama sejak tanggal dimulainya operasional sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini; -----
- b. Dapat mengelola Jasa Usaha di lokasi Perjanjian sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan Persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; -----
- c. Menerima bimbingan teknis dalam pelaksanaan konservasi, rehabilitasi hutan dan pengelolaan wisata dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; -----

6. **PIHAK KETIGA** berkewajiban; -----

- a. Membayar pendapatan bagi hasil dari obyek perjanjian ini terhitung sejak tanggal dimulainya operasional kepada **PIHAK KESATU** sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan **PIHAK KEDUA** sebesar 25 % (dua puluh lima persen), setelah dikurangi kewajiban membayar pajak dan asuransi disetiap bulan;-----
- b. Menerima Karcis Tanda Masuk yang sudah diperporasi dari **PIHAK KEDUA**;-----
- c. Melakukan penarikan karcis tanda masuk di obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; -
- d. Menyampaikan laporan pendapatan per bulan secara tertulis paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya disertai bukti karcis tanda masuk yang terjual (bonggol karcis) kepada **PIHAK KESATU**; -----
- e. Memberikan salinan laporan pendapatan sebagaimana huruf e kepada **PIHAK KEDUA**, setelah dihitung dan disahkan oleh **PIHAK KESATU**; -----
- f. Memasukkan semua pendapatan bruto ke rekening Bank **PIHAK KETIGA** setiap hari Kamis dan Senin atau hari berikutnya jika hari tersebut libur; -----
- g. Membayarkan asuransi kecelakaan wisatawan dalam lokasi obyek perjanjian sebagaimana pasal 3 perjanjian ini melalui **PIHAK KESATU** kepada penyelenggara asuransi "**PT. ASURANSI JIWA SYARI'AH AMANAH JIWA GIRI ARTHA**";-----
- h. Membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan isi perjanjian kerjasama ini; -----
- i. Menugaskan personil yang sudah bertugas sebelum pelaksanaan PKS ini dan menambah personil baru sesuai dengan kebutuhan untuk pengelolaan obyek wisata sebagaimana pasal 3 perjanjian ini (penarikan Karcis Tanda Masuk, pengamanan/ketertiban obyek wisata, pemandu wisata, kebersihan serta pemeliharaan sarana prasarana wisata dan kelestarian wisata di obyek perjanjian);-----

- j. Melakukan usaha perlindungan dan pengamanan sumber daya hutan pada lokasi perjanjian secara berkelanjutan sesuai dengan kapasitasnya dan melakukan pemeliharaan fasilitas destinasi wisata; -----
- k. Membantu memelihara alur, batas hutan/ batas areal lokasi perjanjian dan membantu menjaga fasilitas obyek wisata; -----
- l. Membantu pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pada perjanjian secara berkelanjutan, dengan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU**; -----
- m. Berperan aktif dalam kesiagaan dan penanggulangan bencana alam bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; -----
- n. Mengurus perijinan terkait kegiatan usaha Jasa wisata sebagaimana tersebut pada pasal 3 perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku; -----
- o. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan promosi aktivitas wisata pada lokasi perjanjian dan menerapkan SAPTA PESONA; -----
- p. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan penataan, pengembangan dan penertiban obyek wisata ; -----
- q. Mengadakan pengawasan dan pemantauan wisatawan di obyek perjanjian kerjasama ini; --
- r. Bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pihak terkait lainnya melakukan penanggulangan, rekonstruksi, penanganan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam, laka laut pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain); -----

Pasal 5 PELAKSANAAN

- 1. Penarikan karcis tanda masuk lokasi wisata secara reguler dan saat ada event sesuai harga yang tertera dalam karcis tanda masuk yang besarnya ditentukan dari hasil kesepakatan **PARA PIHAK**; -----
- 2. Penetapan Harga Karcis ditetapkan dengan Berita Acara hasil Kesepakatan **PARA PIHAK**; -----
- 3. Penarikan karcis tanda masuk dilaksanakan **PIHAK KETIGA** ; -----
- 4. Dalam Kondisi tertentu / insidental penarikan karcis tanda masuk dapat didampingi oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; -----
- 5. Teknis pelaksanaan dan pengelolaan obyek wisata dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA**; -----
- 6. Biaya operasional pengelolaan obyek wisata menjadi beban **PIHAK KETIGA**; -----
- 7. Cetak karcis dan Biaya Cetak dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
- 8. **PIHAK KETIGA** membayarkan asuransi kecelakaan wisatawan dalam lokasi obyek perjanjian sebagaimana pasal 3 perjanjian ini melalui **PIHAK KESATU** kepada penyelenggara asuransi "PT. ASURANSI JIWA SYARI'AH AMANAH JIWA GIRI ARTHA"; -----
- 9. **PIHAK KETIGA** membayar pajak perporasi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar; -----
- 10. **PIHAK KETIGA** membuat pembukuan pendapatan setiap hari dan membuat laporan pendapatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya; -----
- 11. Dalam hal pelayanan terhadap Rombongan Wisatawan yang dikelola oleh Travel dan sejenisnya yang berjumlah minimal 20 orang, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan insentif berupa potongan Harga Karcis Tanda Masuk sebesar 10 % (sepuluh) persen tiap orang ; -----
- 12. Pada waktu tertentu dapat diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pariwisata di lokasi perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** atau salah satu dari **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan event di lokasi perjanjian .
- b. Event yang diselenggarakan diluar **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini harus bekerjasama dengan **PIHAK KETIGA**.
- c. Pelaksanaan dan biaya cetak karcis dalam penyelenggaraan event menjadi tanggungjawab penyelenggara.

Pasal 6 **BAGI HASIL USAHA**

1. Bagi hasil usaha dari pendapatan semua kegiatan pada lokasi perjanjian yaitu karcis tanda masuk dibagi diantara **PARA PIHAK** setelah dikurangi pajak dan asuransi sebagai berikut: -----
 - a. **PIHAK KESATU** sebesar 25 % (dua puluh lima persen); -----
 - b. **PIHAK KEDUA** sebesar 25 % (dua puluh lima persen); -----
 - c. **PIHAK KETIGA** sebesar 50 % (lima puluh persen);-----
2. Dalam hal penyelenggaraan event oleh salah satu dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini, maka pihak penyelenggara mendapatkan bagi hasil sebesar 70% dan pihak lainnya 15% dari pendapatan netto (pendapatan bruto dikurangi pajak perporasi dan asuransi).

Pasal 7 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran bagi hasil kegiatan pengelolaan wisata pada obyek perjanjian dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; -----
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk **PIHAK KESATU** dibayarkan secara tunai ke Bendaharawan KPH Blitar, sedangkan **PIHAK KEDUA** dibayarkan melalui transfer ke Kasda nomor rek ; -----
3. Premi asuransi dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada "**PT. ASURANSI JIWA SYARI'AH AMANAH JIWA GIRI ARTHA**" secara tunai melalui Bendaharawan Perhutani KPH Blitar -----
4. Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa pemberitahuan secara resmi dari **PIHAK KETIGA**, akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Bagi Hasil per hari keterlambatan untuk selanjutnya akan dibayarkan ke **PIHAK KESATU** 2,5 % (dua koma lima persen) dan **PIHAK KEDUA** 2,5% (dua koma lima persen); -----
5. **PIHAK KETIGA** memberitahukan mengenai pembayaran tersebut pada ayat (2) kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK ASURANSI** secara tertulis; -----

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022 ;-----

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan rapat evaluasi yang dilaksanakan selambat - lambatnya 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir; -----
3. Dalam hal jangka waktu perjanjian ini berakhir masih ada hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan, maka dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikannya;-----

Pasal 9

LARANGAN

1. PARA PIHAK dilarang mengalihkan kepada pihak lain manapun baik sebagian maupun secara keseluruhan obyek yang dikerjasamakan; -----
2. PARA PIHAK dilarang menjaminkan atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruhnya dari obyek Perjanjian ini; -----
3. PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA dilarang menebang pohon pada lokasi Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK KESATU; -----
4. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dilarang membuat bangunan di lokasi obyek perjanjian ini diluar master plan pengembangan Wana Wisata Pantai Jolosutro yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; -----
5. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dilarang mengubah, memindahkan, merusak, dan atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang ada pada kawasan hutan yang dikerjasamakan;
6. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak boleh merubah status dan fungsi kawasan hutan yang menjadi obyek Perjanjian ini;-----

Pasal 10

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka pihak lainnya berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1257 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; -----
2. PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu melakukan teguran berupa surat peringatan kepada PIHAK yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sebelum memutuskan perjanjian;-----
3. Pemutusan Perjanjian dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib menyerahkan obyek perjanjian kepada PIHAK KESATU;-----
4. Segala biaya yang timbul akibat adanya pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pemutusan perjanjian; -----
5. Segala biaya yang timbul akibat pemutusan perjanjian dikarenakan adanya wanprestasi (ingkar janji), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji); ----

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian setiap 1 (satu) bulan sekali;-----

2. PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan wana wisata minimal setiap sebulan sekali kecuali diperlukan oleh salah satu dari PARA PIHAK terkait tentang pelaksanaan pengelolaan pada bulan berjalan; -----
3. Salah satu hasil monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK akan dipakai sebagai rumusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Pantai Jolosutro selanjutnya;-----

Pasal 12

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJOR

1. Apabila PARA PIHAK gagal memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban atau ketentuan seperti yang diatur dalam perjanjian ini, yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya yang terjadi sebagai akibat hal-hal diluar kemampuannya dan dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar, maka PARA PIHAK tidak memiliki hak untuk saling menuntut; -----
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahu pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan kahar disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;-
3. Atas pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan kahar pihak lainnya akan menyetujui secara tertulis keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut;-----
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak mengalami keadaan kahar, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberi jawaban maka pihak tersebut dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut;-----
5. Apabila terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK sepakat membicarakan dan mencari jalan penyelesaian;-----

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan PARA PIHAK akibat Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; -----
2. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat tidak mendapat kesepakatan, maka PARA PIHAK memilih dan sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Blitar; -

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;-----
2. Apabila dikemudian hari terbit peraturan perundang-undangan atau Keputusan Direksi Perum Perhutani yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan disesuaikan dengan peraturan peraturaperundang-undangan yang berlaku dengan tidak meninggalkan pendapat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA; -----

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang bunyi dan isinya sama, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama kemudian ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan satu untuk PIHAK KETIGA;-----

